**ARTIKEL TESIS**

**MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KEBAKARAN DI KOTA BANDUNG**

**Oleh :**

**HENDRI NUGRAHA**

**NPM : 208010005**

****

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG 2023**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penelitian**

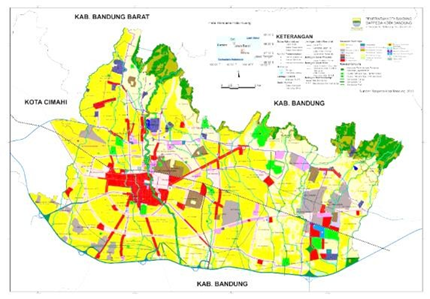
Ancaman bahaya kebakaran merupakan ancaman bersama, terlebih ketika ancaman bahaya tersebut berubah menjadi suatu bencana yang dapat merugikan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hangusnya pemukiman penduduk, rusaknya lingkungan hidup dan sarana prasarana utilitas umum, hilangnya harta benda, korban jiwa hingga gangguan psikologis, merupakan potensi ancaman bahaya kebakaran yang kerap terjadi dan harus mampu dicegah serta ditanggulangi bersama secara lebih efektif dan efisien.

Demikian halnya dengan ancaman bencana kebakaran di Kota Bandung. Dimana, potensi ancaman bencana yang semakin tinggi harus mampu dicegah dan di tanggulangi bersama secara lebih terstruktur dan berkesinambungan, guna melindungi ±2,53 juta jiwa penduduk kota pada malam hari dan ±2,7 juta jiwa di siang hari. Kepadatan penduduk yang terus bertambah hingga ±15,17 ribu jiwa per km persegi dengan aktivitas perekonomian yang semakin tinggi dan kompleks, mampu menciptakan kondisi Ibukota Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi sangat rentan terhadap ancaman terjadinya suatu bencana.

Musibah kebakaran merupakan bencana yang kerap terjadi di tengah hiruk-pikuknya kehidupan Kota Bandung. Kerapatan pemukiman penduduk dengan pelbagai konstruksi bangunan yang cenderung vertikal menjadi suatu fenomena kondisi bangunan yang dapat memicu semakin besarnya potensi ancaman bahaya musibah kebakaran berubah menjadi suatu bencana yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Musibah kebakaran bukan satu-satunya potensi ancaman bencana bagi Kota Bandung, ancaman bahaya banjir dan longsor di beberapa wilayah kota, angin puting beliung, pohon tumbang, ancaman terjadinya getaran bumi atau gempa berkuatan besar yang di akibatkan dari pergerakan aktif Sesar Lembang hingga ancaman hewan liar yang memasuki pemukiman penduduk, merupakan beberapa ancaman serius bagi Kota Bandung yang harus dikelola bersama dalam pengendaliannya.

**GAMBAR 1.1.**

**PETA WILAYAH KOTA BANDUNG**



**Jumlah Penduduk = 2,53 JT**

30 Kecamatan

*Sumber*: Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kota Bandung 2022

Kota Bandung memiliki luas wilayah ±16.729.65 hektar terdiri dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan tersebut, merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat yang dijadikan sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan. Seiring dengan pesatnya pembangunan di Kota Bandung, musibah kebakaran merupakan bencana yang kerap terjadi dalam prosesnya. Berdasarkan jumlah angka kebakaran di Kota Bandung, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah mencatat sejumlah pengaduan masyarakat terkait laporan kebakaran dari tahun ke tahunnya:

**TABEL 1.1.**

**DATA KEBAKARAN DI KOTA BANDUNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Kejadian** | **Korban** | | **Luas**  **(M2)** | **Kerugian**  **(Rp)** |
| **MD** | **LK** |
| 2007 | 160 | 3 | 10 | 38044 | 36,521,500,000 |
| 2008 | 141 | 1 | 8 | 23261 | 12,235,700,000 |
| 2009 | 121 | 2 | 9 | 21565 | 10,001,200,000 |
| 2010 | 101 | 0 | 4 | 24471 | 61,282,500,000 |
| 2011 | 124 | 1 | 5 | 12064 | 12,430,250,000 |
| 2012 | 137 | 0 | 0 | 36535 | 11,871,000,000 |
| 2013 | 131 | 1 | 3 | 24990 | 27,356,500,000 |
| 2014 | 162 | 2 | 4 | 40076 | 182,381,500,000 |
| 2015 | 177 | 1 | 4 | 100577 | 21,560,000,000 |
| 2016 | 107 | 2 | 10 | 9954 | 22,738,500,000 |
| 2017 | 198 | 5 | 18 | 43195 | 53,633,200,000 |
| 2018 | 258 | 3 | 24 | 96839 | 41,460,100,000 |
| 2019 | 272 | 7 | 82 | 61029 | 41,203,700,000 |
| 2020 | 195 | 0 | 39 | 82797 | 705,919,770,185 |
| 2021 | 182 | 3 | 19 | 22780 | 337,136,566,000 |

*Sumber*: Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kota Bandung 2022

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dengan pertimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menginstruksikan, bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan organisasi perangkat daerah guna membantu tugas pemerintah daerah dalam aspek pelayanan masyarakat sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan kehidupan. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sebagai respon implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Berdasarkan fenomena di lapangan, *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung belum optimal. Dimana, peneliti mengindikasikan *collaborative governance* yang dilakukan belum melalui pendekatan kolaborasi secara teoritis, sehingga proses yang dilakukannya cenderung belum berdampak pada perubahan *mindset* para *stakeholder* dalam upaya penanganan kebakaran di Kota Bandung. Berikut dimensi-dimensi *collaborative governance* yang seharusnya menjadi pusat perhatian bagi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penyelenggaraannya:

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Belum menyadari dan memahami sepenuhnya terkait kondisi awal yang dimiliki organisasi, seperti adanya kesenjangan atau keterbatasan sumber daya dan pengetahuan dalam penanganan kebakaran. Dimana, keterbatasan sumber daya manusia dalam aspek kualitas dan kuantitas dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam kolaborasi, kualifikasi kompetensi pegawai yang belum memadai dan disesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang semakin meningat dan kompleks. Rotasi mutasi pegawai maupun pimpinan yang kerap silih berganti berdampak pada profesionalisme kinerja organisasi relatif menurun, karena peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya belum dijadikan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

1. Kepemimpinan Fasilitatif (*Fasilitative Leadership*)

Belum optimalnya penerapan gaya kepemimpinan fasilitatif yang diterapkan oleh para pemimpin di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Kebijakan rotasi mutasi pimpinan memungkinkan perubahan penerapan gaya kepemimpinan yang diterapkan akan berbeda dan cenderung berubah-ubah. Gaya kepemimpinan yang mampu merangkul, mengajak, mengintegrasikan, mengelola dan memberdayakan para *stakeholder* secara umum belum nampak dengan optimal. Sementara, penerapan gaya kepemimpinan fasilitatif menjadi esensial sekaligus memiliki sisi *urgency* yang tinggi bagi *leading sector* pencegahan dan penanggulangan kebakaran, mengingat potensi ancaman musibah kebakaran dan bencana lainnya yang semakin tinggi, tidak mampu di lakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung secara mandiri karena berbagai keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Sehingga, kepemimpinan fasilitatif memungkinkan untuk mampu mengintegrasikan serta memfasilitasi keterlibatan para *stakeholder* dalam berperan aktif menangani kebakaran di Kota Bandung. Sementara, proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung masih dalam tahap komunikasi dan koordinasi di lapangan atau pada saat kejadian saja, namun tidak berlanjut ke arah forum kerjasama yang lebih formal dalam upaya penanganan kebakaran di Kota Bandung.

1. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Belum optimalnya pemanfaatan serta interpretasi desain kelembagaan yang telah terbangun. Kelembagaan dalam upaya penanganan kebakaran umumnya telah terkonstruksi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman musibah kebakaran yang kerap terjadi melalui permintaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan. Namun, regulasi dalam pengelolaannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki organisasi. Sehingga, interpretasi serta aktualisasi peran *stakeholders* belum dapat dilakukan secara optimal.

1. Proses Kolaborasi (*Collaboration Process*)

Belum optimalnya proses kolaborasi dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung, dilatarbelakangi belum disadari dan dipahami secara mendalam terkait proses kolaborasi. Dimana, proses kolaborasi merupakan suatu siklus yang didalamnya memiliki dimensi-dimensi kolaborasi yang saling memberikan kontribusi penting, seperti dimensi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan akan berdampak pada proses kolaborasi. Belum optimalnya pemahaman serta implementasi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam collaborative governance berdampak pada proses kolaborasinya pun belum berjalan dengan baik. Berikut siklus *collaborative governance* dalam dimensi proses kolaborasi model *collaborative governance* yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash (2018:13-14):

**1.2. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

**1.2.1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti akan memfokuskan permasalahan pada empat dimensi kolaborasi yang menjadi pusat perhatian dalam model *collaborative governance* penanganan kebakaran di Kota Bandung.

**1.2.2. Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian akan dibagi menjadi 5 (lima) sub fokus penelitian terkait faktor *collaborative governance* dalam aspek proses kolaborasi dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung yang menjadi inti dari model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, sebagai berikut:

1. *Face to Face Dialogue*, Kondisi dialog/komunikasi melalui tatap muka yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dengan para *stakeholder* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
2. *Trust Building*, Kondisi pembangunan kepercayaan (identifikasi masalah, nilai-nilai) dan komitmen dari para *stakeholder* yang di lakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
3. *Commitmen to Process,* Kondisi pembangunan komitmen dari para *stakeholder* dalam proses kolaborasi yang di lakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
4. *Shared Understanding*, Kondisi pembangunan kesepahaman para *stakeholder* yang di lakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
5. *Intermediate Outcome*, Kondisi rencana strategis serta terobosan dan inovasi-inovasi yang di lakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung.

**1.3. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah (*problem statement*) yang menjadi pertanyaan penelitian (*research question*), sebagai berikut:

1. Bagaimana *collaborative governance* Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam *collaborative governance* menangani kebakaran di Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam membangun *collaborative governance* dalam Penanganan Kebakaran di Kota Bandung?
4. Bagaimana Model *Collaborative Governance* yang diterapkan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam menangani kebakaran di Kota Bandung?

**1.4. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

**1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fenomena-fenomena permasalahan dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi *collaborative governance* yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam membangun *collaborative governance* penanganan Kebakaran di Kota Bandung;
4. Untuk mengetahui model *Collaborative Governance* yang diterapkan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung?

**1.4.2. Kegunaan Penelitian**

**1.4.2.1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penulisan karya tulis ilmiah berupa thesis ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai penerapan berbagai teori yang peneliti dapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas Pasundan Bandung dan telah memberikan banyak wacana ilmiah mengenai kajian Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Pentingnya penerapan pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) dewasa ini menjadi suatu strategi efektif dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Sementara, c*ollaborative governance* merupakan suatu perwujudan dan cerminan dari implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governace*) dengan mengedepankan kerjasama yang terintegrasi antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih professional dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung.

**1.4.2.2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran maupun bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung umumnya dan bagi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung khususnya, untuk lebih mengedepankan dan menerapkan pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) secara lebih optimal. Mengingat, semakin pesatnya pembangunan dan tingginya aktivitas perekonomian, maka potensi-potensi ancaman bencana kebakaran dan bencana lainnya akan semakin tinggi dan kompleks. Terlebih, *trend* bencana akan terus meningkat secara signifikan di masa mendatang yang diakibatkan oleh suhu bumi yang tengah mengalami peningkatan maupun gangguan dari cuaca ekstrim (*extreme climate events*). Dengan demikian, Kota Bandung harus mampu meningkatkan kualitas kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat akademisi untuk bersama-sama menghadapi tantangan tersebut secara lebih efektif, efisien dan produktif.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR dan PROPOSISI**

**2.1. Kajian Pustaka**

**2.1.1. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian peneliti tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ditulis peneliti lainnya sebagai karya ilmiah. Penelitian terdahulu diperlukan guna menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian peneliti. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian peneliti sekaligus dijadikan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian peneliti dalam penelitian. Hal ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum atau bahan penjelas tentang konteks penelitian peneliti dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian peneliti:

**2.1.1.1. Hasil Penelitian Fawwas Aldi Tilano dan Sri Suwitri (2018)**

Penelitian ini dilakukan karena jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia turus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan data Laka Lantas Polrestabes Semarang pada tahun 2015 di dapat data jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang sebanyak 872 kejadian dan pada tahun 2016 meningkat 24,2% menjadi 1.083 kejadian, sedangkan pada tahun 2017 angka kejadiannya mengalami penurunan 13,57% menjadi 936 kejadian. Demikian halnya dengan jumlah korban pada tahun 2015 sebanyak 1.299 korban dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan 2,85% sebanyak 1.336 korban, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan 11,6%. Jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan pada tahun 2015 sebanyak 1.801 kendaraan dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 24,1% menjadi 2.235 kendaraan, pada tahun 2017 mengalami penurunan 31,99% menjadi 1520 kendaraan.

Berdasarkan tinjauan pustaka (*literature* *review*) dari penelitian terdahulu tentang konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan terkait kolaborasi, umumnya memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Namun, yang menjadi pembeda adalah konteks penelitian pada fokus dan lokus yang berbeda, berikut relevansi dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

**2.1.2. Kajian Administrasi Publik**

Peran administrasi publik dalam suatu negara sangat vital. Hal ini dapat terlihat dalam suatu kondisi ekonomi suatu negara akan bergantung kepada dinamika administrasi publik itu sendiri. Di samping itu, administrasi publik menjadi sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat ketika pemerintah telah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektivitasnya.

**2.1.2.1. Konsep Administrasi**

Sejatinya, administrasi bukan hal yang asing bagi umat manusia. Karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kehadiran manusia lainnya untuk berinteraksi, bekerja sama serta membentuk kelompok dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya serta kesadaran bahwa dengan bekerjasama, pemenuhan kebutuhan dirasa lebih berhasil dibanding dilakukan secara individual.

**2.1.2.2. Publik**

Pasolong (2019:7-8) mengemukakan bahwa kata publik secara etimologis berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang memiliki arti umum, rakyat umum atau orang banyak dan rakyat. Namun menurut pandangannya, kata “publik” memiliki terjemahan yang berbeda-beda bergantung pada kepentingan dalam pemaknaannya. Hal tersebut berangkat dari suatu pertanyaan yang dimilikinya, seperti kata “*Public Administration*” diterjemahkan menjadi “*Administrasi Negara*”, apakah “*Public*” itu sama dengan ”Negara”?, jika “*Public*” sama dengan “Negara”, maka “*Public Administration*” sama dengan “*State Administration*”. Sedangkan secara konseptual, cakupan “*State*” lebih luas daripada “*Public*”.

Terlepas dari pertanyaan tersebut, Syafi’ie dkk (1999) dalam Pasolong (2019:7-8), mengungkapkan bahwa publik, adalah:

“Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

Sementara H. George Frederickson (1997) dalam Pasolong (2019:7-8), menjelaskan konsep “publik” dalam lima perspektif, yaitu:

(1) Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat.

(2) Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri.

(3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui “suara”.

(4) Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik.

(5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

**2.1.2.3. Konsep Administrasi Publik**

Administrasi publik mengalami perubahan paradigma dari waktu ke waktu, seiring meningkatnya tuntutan kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks disertai kemajuan pola pikir masyarakat, menjadikan konsep administrasi publik terus mengalami perubahan.

Hal tersebut selaras dengan ungkapan Kasim (1994:8), yang mengungkapkan bahwa:

“Perkembangan administrasi publik di suatu negara dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, dimana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik, sehingga adminitrasi publik dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang selalu berubah”.

Pergeseran paradigma administrasi publikmulai dari *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPS) hingga yang dianggap terbaru saat ini adalah *Whole of Government* (WoG) merupakan beberapa konsep pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan aspek pelayanan publik yang di dasari oleh tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan negara yang dianggap tidak sesuai dan gagal, menuai ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, menjadikan hal tersebut sebagai faktor pendorong paradigma administrasi publik terus mengalami pergeseran. Yang pada akhirnya, menuntut pemeritah sebagai penyelenggara pemerintahan melakukan reformasi pengelolaan dalam pelayanannya secara lebih efektif dan efisien.

**2.1.3.1. Paradigma Baru Manajemen**

Paradigma baru manajemen terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks disertai kemajuan pola pikir kritis yang masyarakat miliki, menjadikan paradigma pengelolaan mengalami perubahan-perubahan ke arah yang dianggap lebih baik.

Kondisi tersebut selaras dengan pandangan Kasim (1994:8) yang mengungkapkan, bahwa:

“Perkembangan administrasi publik di suatu negara dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, dimana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik, sehingga administrasi publik dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang selalu berubah”.

Pandangan tersebut dapat dimaknai bahwa perkembangan adminitrasi publik dalam operasionalisasi pelayanannya terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin menguat dan kompleks. Sehingga menuntut pemerintah sebagai administrator untuk melakukan reformasi pengelolaan dalam pelayanannya secara lebih efektif dan efisien.

**2.1.3.2. Whole of Government (WoG)**

*Whole of Government* adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya *Whole of Government* juga dikenal sebagai pendekatan *interagency*, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

**2.1.4. Kepemerintahan**

Secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah negara modern (organisasi), di samping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya.

Sementara itu, Sedarmayanti (2018:30) mengedepankan arti pemerintahan berdasarkan ajaran Tripraja, bahwa pemerintahan dalam arti sempit yaitu kekuasaan eksekutif saja. Dimana, UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden dan Para Menteri. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

**2.1.5. Good Governance**

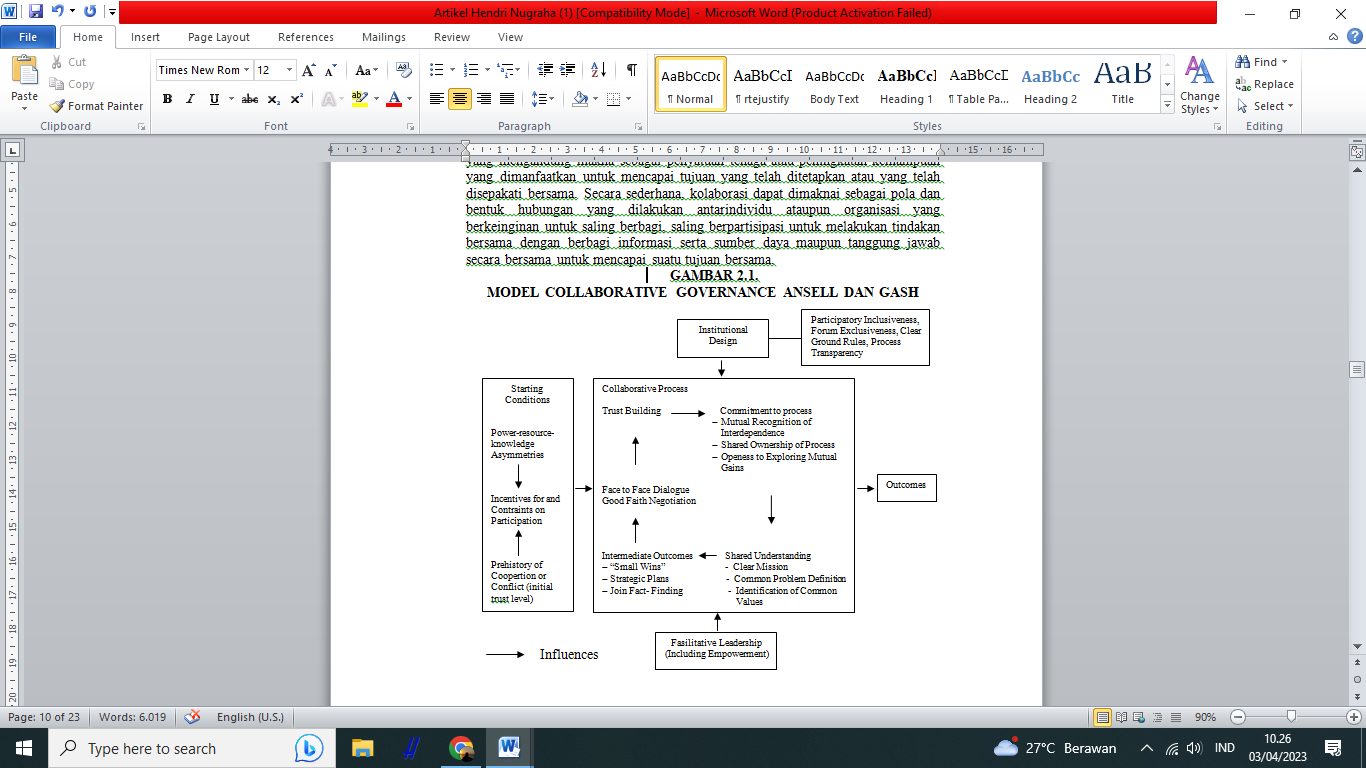
Konsep *good governance* mengisyaratkan adanya keterlibatan antara tiga pilar utama, yaitu: pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil yang saling menjaga, *support* dan berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.

**2.1.6. Collaborative Governance**

*Colaborative* atau kolaborasi secara etimologi berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Secara sederhana, kolaborasi dapat dimaknai sebagai pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antarindividu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi untuk melakukan tindakan bersama dengan berbagi informasi serta sumber daya maupun tanggung jawab secara bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Ansell dan Gash (2008) dalam Islamy (2018:1) mendefinisikan *collaborative governance*, sebagai:

“*A governing arrangement where one or more pulic agencies directly angage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*”. *Collaborative governance* merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholders non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi *consensus*, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau asset publik.

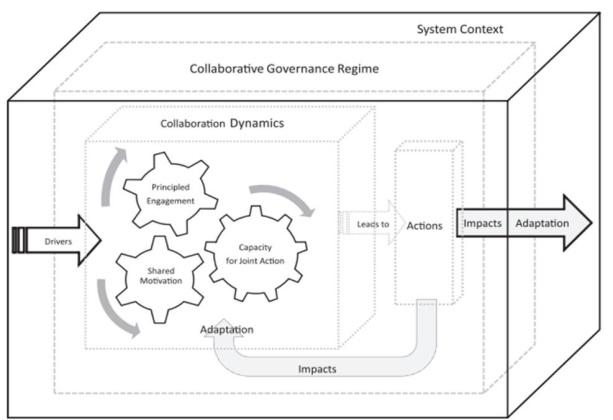


*Sumber*: Islamy (2018:14)

*Collaborative governance* senantiasa digambarkan sebagai tahap pengembangan kesepakatan yang menjelaskan bagaimana fase-fase program kolaborasi dilaksanakan mulai dari fase pra negosiasi, fase negosiasi, sampai pada implementasi program. Sehingga keberhasilan kolaborasi bergantung pada bagaimana siklus kolaborasi itu berputar mulai dari komunikasi, membangun kepercayaan, komitmen, berbagi pemahaman sampai kepada hasil yang ingin dicapai.

**GAMBAR 2.2.**

**THE INTEGRATIVE FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE GOVERNANCE**



*Sumber*: Subarsono (2016:199)

**2.1.14.2. Alasan, Manfaat dan Tujuan Kolaborasi**

Kolaborasi diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumberdaya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dilakukan guna menyatukan dan melengkapi, yang akan mendorong pada keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Charles Horton Cooley dalam Abdulsyani (2007) mengemukakan bahwa sebelum menentukan jenis kerjasama yang akan dilakukan, masing-masing aktor atau lembaga harus terlebih dahulu memahami hal-hal yang menjadi permasalahan baik yang sedang dialami maupun yang akan dihadapi. Kolaborasi dapat timbul apabila masing-masing pihak memahami beberapa hal berikut:

1. Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kolaborasi.
2. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kolaborasi yang berguna.

**2.2. Kerangka Berpikir**

*Collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung menjadi suatu kebutuhan yang mendasar (*sine qua non*). Dimana, kemajuan serta kepesatan pembangunannya harus diimbangi oleh kapasitas yang di miliki pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Semakin pesat pembangunan, maka lingkungan hidup akan semakin terdegradasi yang dapat memicu pelbagai potensi ancaman bencana yang semakin meningkat dan kompleks.

Hasil kajian ilmiah yang dilakukan para ilmuwan yang tergabung dalam panel perubahan iklim di seluruh dunia IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) dan UN ISDR (*United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction*), dapat dijadikan sebagai rujukan pentingnya *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung. Dimana, suhu bumi tengah mengalami kenaikan, yang di akibatkan oleh gangguan cuaca ekstrim (*extreme climate events*) dan *trend* bencana akan meningkat secara signifikan di masa mendatang. Kondisi tersebut menjadikan suatu tantangan besar bagi masyarakat Kota Bandung dalam menghadapinya. Selanjutnya, para ilmuwan perubahan iklim seluruh dunia tersebut, menyebutkan bahwa negara Indonesia dapat menjadi suatu labolatorium bencana terlengkap di dunia (*the biggest world disaster laboratory*) karena kejadian bencananya yang cenderung terus mengalami peningkatan.

Gangguan cuaca yang ekstrim dan kejadian bencana yang cenderung terus meningkat di negara Indonesia, menjadi suatu kondisi memprihatinkan yang harus menjadi perhatian bersama dalam pengelolaan dan pengendaliannya, kondisi kadar air didalam tanah berkurang dapat memicu kebakaran mudah terjadi. Terdegradasinya lahan hijau sebagai resapan air, akan menyebabkan banjir ketika musim penghujan tiba. Menurunnya kualitas lahan dan lingkungan perlu menjadi perhatian bersama melalui pengelolaan yang terstruktur dan sistematis, agar tidak terciptanya kondisi krisis bagi Kota Bandung dalam pembangunannya.

**BAB III**

**OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

**3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah wilayah atau daerah penelitian dimana peneliti melakukan penelitian. Ada pun objek penelitian peneliti adalah Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang bergerak sebagai *leading sector* aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran di Kota Bandung yang beralamat di Jalan Sukabumi Nomor 17 Kota Bandung.

**3.1.1. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung**

Status dan berdirinya Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah banyak mengalami perubahan. Di awali pada jaman Kota Bandung berstatus *Gemeente* (Kotamadya), penanggulangan kebakaran di integrasikan dengan pembangunan jalan-jalan utama, dibuat hidran yang sumber airnya dihubungkan dengan pipa air minum. Saat Kota Bandung berubah status menjadi Kota Praja, menyediakan mobil pemadam kebakaran yang dikenal masyarakat dengan sebutan *Branweer.* Pemadam kebakaran pertama memiliki markas di Jalan Timur atau lebih dikenal dengan Jalan Ahmad Yani No. 296. Pada tanggal 2 Oktober 1962, Pemerintah Kota Praja Bandung membentuk Urusan Pemadam Kebakaran (UPK) yang yang menginduk ke Dinas Teknik Penyehatan (DPT) yang saat ini dikenal dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pada era reformasi, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka pengelolaan penanggulangan kebakaran mengalami perubahan kembali menjadi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung saat ini merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bergerak di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran serta tindakan Penyelamatan yang di landasi Keputusan Walikota No.875.1/Kep.522-diskar/2012 tentang pendelegasian sebagian wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebakaran Kota Bandung dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 05 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bandung No. 297 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung serta nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1400 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung.

**GAMBAR 3.1.**

**KANTOR DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG**

****

Sumber: Diskar PB Kota Bandung

**3.2. Metode Penelitian**

Metode penelitian didefinisikan oleh Sugiyono (1997) dalam Bachtiar (2011:121) bahwa metode penelitian, adalah:

“ Sebagai cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid, dan variabel, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam administrasi”.

Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data serta informasi terkait belum optimalnya model *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung untuk dapat dipahami, mencari solusi serta evaluasi dalam pelaksanaannya.

**3.3. Operasional Parameter**

Konsep atau pengertian ini merupakan unsur pokok dari suatu penelitian untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka dari masing-masing faktor secara konsepsional dapat dirumuskan, sebagai berikut:

Model *Collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung dapat dilakukan berdasarkan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dengan parameter: (1) Kondisi Awal; (2) Kepemimpinan Fasilitatif; (3) Desain Kelembagaan; dan (4) Proses Kolaborasi.

Sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang ditetapkan, maka peneliti menggunakan model *collaborative governance* yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash dalam tabel berikut.

**3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam setiap penelitian, data merupakan faktor penting yang akan menentukan pada bagaimana hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengumpulan data memiliki peran strategis dalam penelitian. Dengan terkumpulnya data, maka upaya menganalisa sudah dapat dilakukan oleh instrument penelitian. Teknik pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan Penelitian Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan dinas yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
2. Studi Lapangan Studi lapangan yaitu peneliti secara langsung mendatangi objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari:
3. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek, gejala atau kegiatan tertentu. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data serta informasi bagi penelitian yang relevan mengenai model *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk memperoleh informasi melalui percakapan langsung dengan responden atau subjek penelitian. Percakapan tersebut dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara dengan maksud tertentu.

1. Dokumentasi

Dokuentasi merupakan pencarian data melalui catatan peristiwa berupa tulisan, gambar, notulen, agenda dan karya-karya. Dokumentasi berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dari data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi diperlukan untuk lebih memperkaya data yang diperoleh peneliti, sehingga diharapkan data tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Hasil Penelitian**

Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan disertai penjelasannya. Hasil penelitian yang disajikan berdasarkan temuan-temuan peneliti selama melakukan observasi di lapangan selama proses penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini didapat peneliti melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) pada beberapa informan kunci (narasumber) yang dianggap relevan pada waktu dan tempat yang tidak ditentukan. Hal tersebut dilakukan guna menghindari subjektivitas data dalam penelitian dan peneliti tidak membatasi jumlah informan kunci, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar peneliti mendapatkan data-data maupun informasi yang lebih mendalam, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi model *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung dengan optimal. Penelitian ini dimuali dari penjajakan lapangan pada awal bulan November 2022. Peneliti langsung melakukan observasi terkait situasi dan kondisi kolaborasi dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

Seiring dengan kepesatan pembangunan di Kota Bandung, potensi ancaman kebakaran pun turut meningkat dan semakin kompleks. Hangusnya pemukiman penduduk, rusaknya lingkungan hidup dan sarana prasarana utilitas umum, hilangnya harta benda, korban jiwa hingga gangguan psikologis merupakan potensi ancaman bahaya kebakaran yang harus ditangani dan ditanggulangi bersama secara lebih efektif dan efisien. Terlebih, potensi ancaman akan terus meningkat secara signifikan seiring dengan adanya isu semakin meningkatnya perubahan iklim global dan degradasi lingkungan.

**4.1.1. Gambaran Umum Model *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kebakaran Di Kota Bandung**

*Collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholders* *non-state* dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus (kesepakatan), deliberatif (musyawarah) yang bertujuan untuk membuat/merumuskan dan menerapkan kebijakan dalam mengelola kebakaran di Kota Bandung agar potensi kejadian dan kerugiannya dapat diminimalisir dan tidak berdampak luas terhadap proses pembangunannya.

**4.2. Pembahasan**

Penanganan kebakaran merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat dimensional yang dialami oleh Kota Bandung. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah berupaya menyelenggarakan program dalam upaya penanganan kebakaran berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan, namun demikian banyaknya kegiatan tersebut dilakukan tidak serta merta mampu mengurangi angka kebakaran di Kota Bandung secara signifikan. Pola Penanganan Kebakaran, tidak dapat lagi diserahkan dan dilakukan secara mandiri kepada/oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sebagai *leading sector*, melainkan membutuhkan upaya *collaborative governance* yang melibatkan para pemangku kepentingan lainnya.

*Collaboative governance* merupakan salah satu instrumen kerjasama yang melibatkan beberapa aktor dalam proses pemerintahan yang mencerminkan konsep *good governance* yang diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mengedepankan pemerintahan kolaboratif dalam memecahkan permasalahan dalam pembangunan. Demikian halnya dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung, semua aktor baik elemen pemerintah, pihak swasta, masyarakat, akademisi dan pihak media terlibat secara kolektif dalam implementasinya. *Collaborative governance* dengan konsep *pentahelix* merupakan pendekatan yang relevan dalam pelaksanaannya, mengingat penanganan kebakaran di Kota Bandung mengisyaratkan adanya interdependensi antara *stakeholder* satu dengan *stakeholder* lainnya.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Dari data-data dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas dan pada rumusan masalah yang sudah di tetapkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. *Collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung belum dapat dilakukan secara optimal. Dimana secara pendekatan teori, dimensi-dimensi pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi, belum dijadikan sebagai pusat perhatian oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam proses pembangunannya. Dimensi Kondisi Awal, Kepemimpinan Fasilitatif dan Desain Kelembagaan yang belum dijadikan sebagai pusat perhatian dalam pelaksanaannya, berdampak pada dimensi Proses Kolaborasi penanganan kebakaran di Kota Bandung yang dilakukan, belum optimal. Meskipun dimensi proses kolaborasi dalam *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung sebagai inti dari model *collaborative governance*, namun ke-tiga dimensi lainnya merupakan dasar yang fundamental dalam membangun infrastruktur organisasi terkait pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung.
2. Faktor penghambat belum optimalnya *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, yakni kurangnya pemahaman secara mendalam dan komitmen yang ditunjukkan para *stakeholder* terkait pentingnya pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung. Adanya perbedaan orientasi/fragmentasi pekerjaan dan tanggung jawab, kesenjangan pemahaman, kesenjangan sumberdaya (anggaran/biaya) hingga sikap primordialisme/ego sector antar *stakeholder* kerap menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung.

.

1. Upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) relatif masih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh infrastruktur organisasi yang belum optimal dalam pembangunannya. Penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang cenderung belum merata/*holistic* dan berkesinambungan, berdampak kepada tingkat kepercayaan, pemahaman serta komitmen para *stakeholder* dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung.

**5.2. Saran**

Sejatinya, *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung merupakan wujud operasionalisasi prinsip dari konsep *good governance*. Dimana, para pemangku kepentingan/*stakeholders* (pemerintah, pihak swasta, masyarakat, akademisi dan media) masing-masing memiliki keterbatasan tertentu dengan kapasitas yang berbeda-beda. Untuk itu, kemitraan menjadi jawaban dalam upaya meminimalisir potensi ancaman serta kemungkinan kerugian besar yang mungkin ditimbulkan dari suatu musibah kebakaran. Semula tata kelola pemerintahan berorientasi pada bekerja secara mandiri menjadi bekerjasama secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama di Kota Bandung. *Collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung diperlukan adanya sinergi kerja yang berbasis komitmen bersama untuk menyelaraskan pemahaman terkait pentingnya penyelenggaraan tersebut bagi pembangunan kehidupan di Kota Bandung.

Ada pun beberapa saran peneliti berdasarkan penelitian di lapangan terkait Model *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kebakaran Di Kota Bandung yang dapat dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah bagi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dapat mengadopsi dan menerapkan konsep dan teori model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash dalam upaya penanganan kebakarannya di Kota Bandung;
2. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung harus mampu menjadikan dimensi-dimensi *collaborative governance* sebagai pusat perhatian dalam mendukung upaya pembangunan *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
3. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung harus memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam pembangunan infrastruktur organisasi melalui pendekatan merit sistem yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan organisasi serta selalu mengedepankan pemerintahan kolaboratif dalam upaya melindungi masyarakat Kota Bandung dari potensi ancaman maupun kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu musibah kebakaran;
4. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran Bencana Kota Bandung harus mampu meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi, interaksi dan koordinasi antar *stakeholders* yang dapat membuahkan *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung secara lebih efektif, efisien dan produktif;
5. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung perlu menerapkan gaya kepemimpinan fasilitatif dalam upaya pembangunan *collaborative governance* penanganan kebakaran di Kota Bandung. Sebagai *leading sector* di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana di Kota Bandung serta memiliki kemampuan dalam memfasilitasi dan menghargai perbedaan dan kecerdasan emosional internal organisasi maupun eksternal organisasi karena organisasi ataupun individu pagawai memiliki etos kerja yang cenderung berbeda satu sama lainnya;
6. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung harus meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi dan penyuluhan secara merata, menyeluruh serta berkesinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan menumbuhkan tingkat kesadaran dan kewaspadaan sekaligus menjadi kekuatan kritis yang konstruktif dari masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Hanafi, M Mamduh. 2016. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Kountur, Ronny. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Abdi Tandur.

Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media

Miles. M., & Huberman, A. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Sage: Beverly Hills, CA.

Moleong, LJ. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.

Mulyadi, Dedi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Adminitrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.

Ramli, Soehatman. 2010. *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Manajement)*. Jakarta: Dian Rakyat.

Sandhyavitri, dkk. 2015. *Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.

Sangkala. 2012. *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: Ombak.

Sedarmayanti. 2018. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama

Silalahi, Ulbert. 1989. *Sudi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu ontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Syaiful Islamy, La Ode. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish: Yogyakarta

**Regulasi:**

* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang diamanatkan pada Pembukaan/Preambule dan pada Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia);
* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
* Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Kep.186/MEN1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja;
* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 16 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
* Buku pedoman Pegawai Negeri Kota Bandung yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2012;
* Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
* Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“PP 79/2013”) Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”);
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
* Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
* Peraturan Walikota Bandung Nomor: 1400 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
* Peraturan Walikota Bandung Nomor: 982 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
* Visi dan Misi Kota Bandung.

**Sumber lain:**

* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/kota-bandung-wilayah-terpadat-di-jawa-barat-pada-2021>: Di akses pada tanggal 31 Maret 2022
* <https://nasional.kompas.com/read/perbedaan-government-dan-governance>: Diakses pada tanggal 15 Maret 2022